

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kehidupan politik Indonesai mengalami transformasi dari perkumpulan sosial keagamaan menjadi kekuatan-kekuatan politik dari asosiasi sukarela menjadi asosiasi kepentingan dari gerakan memperjuangkan kemerdekaan ke pola gerakan mengisi dan memaknai kemerdekaan. Pasca-Agustus 1945 bulan dan tahun diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia,berbagai kekuatan politik melakukan koordinasi dan berdiri sejumlah partai politik sebagai manifestasi dari sistem demokrasi yang diakomodasi dalam konstitusi Indonesia. Semua kelompok kepentingan yang telah mewarnai perjalanan Indonesia menjadi negara merdeka mengoordinasikan berbagai kepentingan mereka untuk mengisi kemerdekaan dan menjalankan kekuasaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Konstestasi Ideologi dan Kepentingan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), p.108.

Hal penting lain yang mewarnai proses politik ini adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan beberapa kejutan penting termasuk perubahan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat serta pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan Indonesia juga dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah berat rumitnya, yaitu mengelola negara untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Setelah penyerahan kedaulatan, tampaknya situasi sosial ekonomi Indonesia tidak lebih baik dari masa sebelumnya. Kesulitan ekonomi pada masa perang kemerdekaan tidaklah dengan mudah dapat diatasi. Rakyat menghadapi kesulitan dalam memperoleh sandang, pangan dan papan. Kalau pun ada harganya sangat mahal dan harus mengikuti sistem penjatahan kupon.<sup>2</sup>

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ir. Sukarno sebagai Kepala Negara atau Presiden, sedangkan

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Konstestasi Ideologi dan Kepentingan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), p.109.

<sup>2</sup> Redi Rachmat, *Tantangan Dan Ronggeongan Terhadap Keutuhan Dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1992), p. 18-19.

Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama. Tokoh-tokoh termuka yang duduk dalam Kabinet Hatta antara lain dari pihak Negara Republik Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilipo, Prof. Dr.Supomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir.Herling Laoh, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ida Anak Agung Gde Agung. Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara Negara-negara bagian yang terpenting selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, adalah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur.<sup>3</sup>

Kabinet RIS di bawah Pimpinan Mohammad Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Dengan berakhirnya Kabinet Mohamad Hatta Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia . Dengan Demikian Negara Republik Indonesia Serikat tidak sampai 1

---

<sup>3</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p. 205.

tahun, dalam usia yang singkat itu RIS dengan satu-satunya pemerintahan di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta harus memecahkan masalah-masalah akibat Perang Kemerdekaan maupun masalah-masalah yang intern dengan kehidupan suatu Negara Baru.<sup>4</sup>

Sesuai dengan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki adanya Negara Kesatuan maka satu demi satu negara-negara bagian yang semua diciptakan Belanda lalu membubarkan diri. Para Pemimpin Negara Bagian juga menghendaki adanya Negara kesatuan dan bergabung kepada Republik Indonesia. Lima Bulan setelah RIS berdiri, telah dicapai persetujuan antara RIS dan RI yang dimanifestasikan dalam Joint-statement Mohammad Hatta (RIS) dengan Dr.Adbul Hakim (RI) mengenai penyatuan Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia.

Pernyataan bersama itu mendapat dukungan penuh dari Masyumi dan peleburan RIS dengan RI terjadi sebelum tanggal 17 Agustus Tahun 1950. Terbentuknya Negara Kesatuan

---

<sup>4</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p. 206.

Republik Indonesia Masyumi merasa optimis akan menjadi partai terbesar dalam Republik Indonesia. Sebab, menurut keterangan Sekretariat DPP Masyumi jumlah anggotanya waktu itu sudah mencapai tiga belas juta orang meskipun yang terdaftar baru ada enam ratus ribu orang. Dari angka sekian itu yang sudah mendapat kartu anggota ada empat ratus ribu orang.<sup>5</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan Resmi RIS dibubarkan dan dibentuk kembali Negara kesatuan yang diberi nama Republik Indonesia. Persiapan untuk membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Kesepakatan antara RIS dan RI untuk membentuk Negara Kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang lebih 2 bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah diadakan pembahasan di masing-masing DPR rancangan UUD Negara Kesatuan diterima baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Pada tanggal 15

---

<sup>5</sup> Soebagijo I.N., *Jusuf Wibisono Karang Di Tengah Gelombang* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980), p.86.

Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani rancangan UUD yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).<sup>6</sup>

Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan Parlementer berlandaskan pada UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950). Sistem pemerintahan Parlementer menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara (voting) yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu), mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik.

Persaingan antar partai dalam kancah politik di Indonesia pada pemerintahan Parlementer sangat jelas terasa. Masing-masing partai berlomba untuk mencapai cita-cita dan tujuan politiknya. Hal ini memicu jatuh banggunya kabinet yang

---

<sup>6</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p.209-210.

memerintah di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal sampai berakhirnya UUDS 1950, terhitung terdapat 7 kabinet yang memerintah. Kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir (September 1950-maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952- juli 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953- 1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959).<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia seringkali tidak menemukan jalan keluar dalam setiap masalah dari segi politik ataupun ekonomi. Sehingga sering terjadi pergantian kabinet dengan waktu yang relative sangat singkat. Kabinet- kabinet yang memimpin Indonesai hanya bertahan rata-rata 10 bulan 10 hari. Pelaksanaan ekonomi yang dirancang untuk jangka panjang tidak pernah telaksana dengan baik dan tuntas.<sup>8</sup> Kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat Indonesia, tidak lain merupakan dampak langsung dari kesulitan yang dialami pemerintah

---

<sup>7</sup> Zulkarnaen, *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pujangga Baru, 2012), p.104.

<sup>8</sup> Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Konstestasi Ideologi dan Kepentingan*, p. 109.

terutama di bidang moneter. Republik Indonesia di tahun-tahun awal penyerahan kedaulatan memiliki hutang luar negeri sebanyak Rp. 1.500 juta dan hutang dalam negeri sebesar Rp. 2.800 juta. Beban yang berat tersebut tidak lain merupakan konsekuensi yang harus diterima dari ketentuan-ketentuan hasil KMB.

Pada sekitar 1950-an pada dasarnya Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah yang ditempuh hanya berupa rehabilitasi struktur perekonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan. Ketika itu belum ada pemikiran dan upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1951 diperkenalkan suatu kebijakan ekonomi yang dikenal dengan rencana urgensi perekonomian. Pada hakekatnya, program ini baru berbentuk daftar proyek-proyek yang menampilkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.

Persoalan ekonomi yang menonjol pada masa itu, yang erat kaitannya dengan suasana politik, adalah keadaan keuangan negara yang menunjukkan terbatasnya jumlah devisa yang

tersedia. Kecenderungan politik negara yang baru terlepas dari cengkaraman kolonialisme tidak mementingkan usaha pencari bantuan luar negeri. Kebijakan lainnya yang muncul pada periode demokrasi parlementer ini adalah mendorong terciptanya lapisan pengusaha nasional. Sejumlah fasilitas disediakan agar pengusaha nasional dapat bangkit dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekonomi nasional kebijakan ini dikenal dengan kebijakan benteng.<sup>9</sup>

Program benteng ini usaha pemerintah untuk melindungi dan mengembangkan kemandirian pengusaha pribumi sebagai sokoguru kekuatan perekonomian nasional serta menekan dominasi kekuatan perekonomian asing dan Cina (nonpribumi) yang berkuasa sejak masa kolonial Hindia Belanda. Hal ini untuk mewujudkan bentuk memberikan lisensi impor, alokasi devisa, dan kredit hanya untuk para pengusaha pribumi. Para pengusaha yang tidak mempunyai keahlian dan permodalan tersebut menjual lisensi dan fasilitas kredit yang diperolehnya kepada para

---

<sup>9</sup> Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), p. 15.

pengusaha Cina atau asing lainnya yang mempunyai sumber dana dan organisasi bisnis yang lebih mapan.<sup>10</sup>

Kebijaksanaan ekonomi Indonesia sejak tahun 1950, bercirikan banyaknya peraturan tentang perdagangan internasional (ekspor-impor). Dengan berbagai nama dan bentuk, secara silih berganti dibuatlah pertaturan-perturan yang tujuannya mendorong ekspor dan menekan impor. Misalnya ada tindakan perjual belian sertifikat secara bebas yang terkenal dengan sebutan Sistem Sertifikat Devisen. Sistem ini kemudian dihapus pada 4 Februari 1952 dan diganti dengan Sistem Sertifikat Bukti Ekspor (BE) pada 12 Agustus 1952.<sup>11</sup>

Salah satu menteri pada masa sistem kabinet parlementer adalah Jusuf Wibisono yang memegang jabatan Menteri Keuangan pada Kabinet Sukiman dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dalam Kabinet Sukiman Menteri Keuangan yaitu Jusuf Wibisono ditugaskan untuk melakukan Nasionalisasi terhadap De Javasche Bank untuk bisa membatasi krisis moneter pada tahun

---

<sup>10</sup> Bedjo Riyanto, *Siasat Mengemah Nikmat Ambiguitas Gaya Hidup Dalam Iklan Rokok Di Masa Hindia Belanda Sampai Pasca Orde Baru 1925-2000*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Realino, 2019), p. 58.

<sup>11</sup> Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), p. 20.

1952 yang dimana pemerintah Indonesia memiliki defisit anggaran belanja sebanyak tiga miliar rupiah ditambah dengan sisa deficit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar. Meskipun dilanda krisis moneter, namun Menteri Keuangan Jusuf Wibisono masih memberikan perhatiannya kepada pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan program benteng kepada para pengusaha dan pedagang nasional diberikan bantuan pinjaman uang. Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan bahwa para pengusaha yang merupakan produsen yang menghemat devisa yang mengurangi impor.<sup>12</sup>

Dalam Programnya di bidang ekonomi-keuangan Kabinet Ali Sastroamidjojo II antara lain menyebutkan bahwa pemerintah harus memperkuat kedudukan pengusaha nasional dengan cara memberi kredit mudah dan lancar mengingat selama ini, pengusaha-pengusaha nasional kecil sukar sekali mendapatkan kredit dari bank-bank pemerintah. Dalam pelaksanaanya, Jusuf Wibisono selaku Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas

---

<sup>12</sup> Soebagijo Ilham Notodidjojo, *Jusuf Wibisono Karang Di Tengah Gelombang*, p.105.

program tersebut kuasa kepada Bank-Bank swasta nasional yang dianggap bonafid untuk memberi kredit kepada pengusaha-pengusaha nasional dengan jaminan dari Kementerian Keuangan.

Salah satu rencananya yang mendapat tantangan keras terutama dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), ialah usahanya untuk meningkatkan mutu serta kesejahteraan para Pegawai Negeri disamping juga untuk penghematan pengeluaran Negara dengan jalan merencanakan rasionalisasi di kalangan Pegawai Negeri. Hal ini dirasa perlu oleh Jusuf Wibisono mengingat jumlah pegawai negeri yang terkena rasionalisasi masih akan menerima gaji yang tiap bulannya dipotong sebesar 20% selama 5 tahun.

Dalam kaitannya dengan masalah kemunduran ekspor yang telah terjadi semenjak tahun 1956. Jusuf Wibisono mengusulkan kepada Dewan Moneter agar memberikan insentif kepada kaum eksportif. Pada awalnya atas usul Jusuf Wibisono premi itu diberikan langsung dalam bentuk valuta asing yang dapat dijual dengan bebas. Namun sebagian anggota Dewan Moneter tidak setuju karena hal tersebut akan mengakibatkan

pengurangan jumlah valuta asing yang sebenarnya malah jumlagnya harus bertambah. Akhirnya disetujui suatu peraturan baru Bukti Pendorong Ekspor (BPE) yang mengatur bahwa Eksportir yang menerima sertikifat BPE berhak membeli valuta asing untuk impor barang dan untuk membayar jasa-jasa. Peraturan tersebut mulai berlaku per Agustus 1956. Karena kurang menarik minat, maka Jusuf Wibisono kembali mengusulkan pemberian premi langsung dalam bentuk valuta asing. Dijelaskan oleh Jusuf Wibisono bahwa hal tersebut memang menghambat usaha memperbanyak valuta asing, namun apabila pengeluaran itu dapat merangsang penerimaan valuta asing lebih banyak tentunya hal itu akan menguntungkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan untuk lebih mengetahui kiprah Jusuf Wibisono pada masa pemerintahan demokrasi parlementer maka penulis mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Kiprah Jusuf Wibisono Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Kabinet Parlementer 1950-1956”.

---

<sup>13</sup> *Rupiah Di Tengah Rentang Sejarah*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1991), p. 53.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Riwayat Hidup Jusuf Wibisono?
2. Bagaimana Kondisi Bangsa Indonesia Pada Tahun 1950-1956?
3. Bagaimana Keterlibatan Jusuf Wibisono Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia 1950-1956?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya dekripsi yang dapat menjelaskan tentang:

1. Riwayat Hidup Jusuf Wibisono.
2. Kondisi Bangsa Indonesia Pada Tahun 1950-1956.
3. Keterlibatan Jusuf Wibisono Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia 1950-1956.

## **D. Kajian Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah ringkasan tertulis penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topic tertentu. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengulas buku atau tulisan yang sudah ada

tentang subjek penelitian serta untuk menempatkan penelitian ini di antara penelitian lain yang sudah ada, untuk itu dilakukan ulasan terhadap sumber yang sudah ada terkait

Pertama, dalam buku Jusuf Wibisono Karang Tengah Di Tengah Gelombang dijelaskan bahwa Jusuf Wibisono yang berpengalaman dalam berbagai organisasi terutama dalam Partai Masyumi pada masa Jepang, Jusuf Wibisono pernah menjabat sebagai Jaksa Ekonomi. Ketika pada masa Parlemerter Jusuf Wibisono masuk dalam Kabinet Sukiman dan Ali Sastroamidjojo II. Keberhasilan dalam Kabinet Sukiman adalah dikeluarkan kebijakan tentang rencana nasionalisasi De Javasche Bank untuk pindah ke tangan Departemen Keuangan, sedangkan dalam kabinet Ali Sastromidjojo II, Jusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan mendorong agar pemerintah memperkuat kedudukan pengusaha nasioanl dengan cara memberi Kredit murah dan mengingat selama itu pengusaha kecil sukar sekali mendapatkan kredit dari bank-bank pemerintah.

Kedua, buku selanjutnya ialah Rupiah Di Tengah Rentang Sejarah, diterbitkan Majalah Anggaran Depatermen Keuangan

Republik Indonesia. Buku ini menjelaskan mengenai perkembangan perjalanan ekonomi Indonesia melalui Departemen Keuangan di buku ini menjelaskan sedikit biografi Jusuf Wibisono yang menjelaskan, Jusuf Wibisono yang lahir di Magelang memiliki teguh pendirian berpendidikan dari HIS, MULO, dan AMS A-II. Semasa muda Jusuf Wibisono mengikuti organisasi keislaman yaitu Jong Islamieten Bond (JIB) dan Studenten Islam Studie-club (SIS). Jusuf Wibisono memegang jabatan Menteri Keuangan pada saat Kabinet Sukiman dan Ali II.

Ketiga, buku yang berjudul Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Karya Boediono, diterbitkan Mizan Pustaka pada tahun 2016. Buku ini menjelaskan keadaan ekonomi di Indonesia bahwa pada tahun 1950-an masa demokrasi parlementer ekonomi Indonesia menjadi tidak bekesinambungan karena tidak stabilnya pemerintahan. Sehingga, persoalan pokok ekonomi makro yang dihadapi pada tahun 1950-an ketimpangan yang terus-menerus dibidang fiskal dan pada neraca pembayarann makin besar karena peningkatan impor tidak

diimbangi dengan peningkatan ekspor Indonesia menghadapi masalah defisit ganda yang kronis.

Keempat, Artikel karya Rif'at Husnul Ma'afi yang berjudul Politik Islam Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 3, Nomor 1, 2013. Pada tulisan ini menjelaskan Pada tahun 1950-1957 ditandai dengan jatuh banggunya partai-partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU keluar dari Masyumi, parpol Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Ciri lainnya tidak satu pun parpol yang mayoritas. Pada masa revolusi, PNI dan Masyumi sering mengadakan kerjasama, namun pada masa ini hubungannya tidak serasi lagi, bahkan dalam saat-saat tertentu sama sekali terputus. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tidak ada yang menang mayoritas. PNI urutan pertama dengan 22,3% suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4%, sedangkan sisa terbagi di antara partai-partai kecil lainnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosial untuk penjelasan dan analisis sejarah. Dimana pendekatan historis ini merupakan pendekatan dengan melihat kesejarahan dan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau langkah kerja yang digunakan untuk penelitian yang bersumber pada masa lalu yang ditanggapi secara kritis dan menuliskannya apa adanya berdasarkan fakta yang ditemukan.

Dengan pendekatan ini penelitian didasarkan pada pengumpulan dan penafsiran terhadap suatu gejala, gagasan ataupun peristiwa masa lampau untuk menemukan generalisasi dalam memahami keadaan yang ada, dan juga digunakan untuk memprediksi perkembangan dimasa yang akan datang. Dalam membahas suatu keadaan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu melalui pendekatan sosial yang mana akan berkesinambungan terhadap masyarakat, gejala sosial, faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan serta kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam sebuah proses terjadinya

sebuah peristiwa. Untuk memperdalam kajian teoritis dalam penelitian tentang dinamika suatu perubahan, maka penulis menggunakan pendekatan historis-sosial yang memberikan sebuah hubungan pemahaman tentang sebuah hubungan terhadap peristiwa yang telah terjadi.

Konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan konsep peranan, kedudukan dan pembangunan. Ketiga konsep tersebut menjadi penting untuk menganalisis kiprah Jusuf Wibisono, khususnya pada pembangunan ekonomi nasional.

Kedudukan (*status*) merupakan posisi sosial yang merupakan tempat dimana seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban dan berbagai aktivitas lain, yang sekaligus merupakan tempat bagi seseorang untuk menanamkan harapan-harapan. Kedudukan merupakan posisi sosial seseorang dalam suatu hierarki dalam kelompok masyarakat.<sup>14</sup> Pada umumnya kedudukan memiliki dua macam, yakni:

---

<sup>14</sup> Mia Amalia, *Pengantar Sosiologi* (Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), p.80

1. *Ascribed Status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Kedudukan tersebut didapatkan secara turun temurun, melalui kelahiran. Misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula.
2. *Achieved Status*, kedudukan yang dicapai seseorang dengan sebuah usaha-usaha yang secara sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Kedudukan ini sifatnya terbuka bagi siapa saja, tergantung kemampuan dari masing-masing individu dalam mengejar dan mencapai tujuannya.<sup>15</sup>

Konsep kedua, Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

---

<sup>15</sup> Endang Hermawan dan Rni Sulastrri, *Sosiologi Pendidikan (Kajian Fenomena Pendidikan Melalui Persepektif Sosiologi dan Ilmu Pendidikan)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), p.130

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat peranan, dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2013), p. 212-213

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali , 1988), p.53

Konsep selanjutnya ialah pembangunan yakni proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.<sup>18</sup> Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.<sup>19</sup>

Pembangunan dalam bidang ekonomi ditunjukkan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama

---

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004), p.89.

<sup>19</sup> Rumewahni, *Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur* (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), p.40.

tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya.<sup>20</sup>

Selanjutnya Konsep Parlemerter, mengenai istilah Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.<sup>21</sup>

Pandangan Peter Harris dan Ben Reilly mendefinisikan sistem parlementer yaitu dimana lembaga legislatif sebagai aktor utama baik untuk penyusunan undang-undang dan untuk kekuasaan eksekutif. Definisi yang sederhana ini seakan-akan

---

<sup>20</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Banung: Alfabeta, 2011), p.13.

<sup>21</sup> Cora dan Elly, "*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*", Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 2, (Juni 2013), p.343.

menunjukkan bahwa lembaga parlemen dengan eksekutif tidak ada pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan oleh Montesquieu dalam konsepnya Trias Politika. Padahal dalam prakteknya, sistem parlementer justru menjamin terjalinnya hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling mempengaruhi antara lembaga eksekutif dengan parlemen. Eksekutif dan parlemen saling tergantung satu sama lainnya.<sup>22</sup>

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer terdapat beberapa pola. Dalam sistem parlementer dengan parlementer executif, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif merupakan pencerminan. Kekuatan-kekuatan politik dibidang legislatif yang mendukungnya. Kabinet ini dinamakan kabinet parlementer. Pada umumnya, ada keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat satu partai mayoritas maka dibentuk kabinet atas kekuatannya sendiri. Kalau tidak terdapat partai mayoritas,

---

<sup>22</sup> Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Universitas Brawijaya Press: Malang, 2015), p.111.

maka dibentuk kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas di badan legislatif. Beberapa negara, seperti Belanda dan negara-negara Skandinavia pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan sekalipun tidak dapat dipungkiri adanya dualisme antar pemerintah dan badan-badan legislatif.<sup>23</sup>

Dari sejumlah kutipan di atas dapat dimengerti, bahwa sistem pemerintahan parlementer menempatkan parlemen sebagai pusat mengendalikan pemerintahan yang dijalankan oleh perdana menteri. Tidak hanya itu, parlemen yang dikusai partai pemenang pemilu atau koalisi partai politik yang mendapat kursi mayoritas di parlemen sangat menentukan keberadaan atau ketiadaan Perdana Menteri dan kabinet yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, dalam sistem parlemen murni, eksekutif sangat tergantung pada kekuasaan legislatif.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>23</sup> Cora dan Elly, “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*”, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 2, (Juni 2013), p.344.

<sup>24</sup> Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, p.112.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, karena objek yang diteliti adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yaitu pada tahun 1950-1956. Menurut Kuntowijoyo, Metode Penelitian Sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk menentukan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Topik yang dipilih harus merupakan topik sejarah, dengan kata lain dapat dibuktikan keabsahannya. Selain itu topik juga sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Keduanya mencerminkan subjektivitas dan objektivitas yang penting dalam penelitian. Menurut Grey, dalam memilih suatu topik

untuk penelitian maka perlu diperhatikan empat kriteria, yaitu nilai, keaslian, kepraktisan, dan kesatuan.<sup>25</sup>

## 2. *Heuristik* (Pengumpulan Sumber)

*Heuristik* adalah proses yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan sumber-sumber, data-data atau jejak sejarah. Sumber atau data sejarah terbagai menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>26</sup> Sumber primer adalah sumber yang dihasilkan atau ditulis pihak-pihak yang secara langsung dan menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah. Dalam hal ini, mendapatkan sumber primer berupa dokumen dan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Sumber primer penulis didapatkan di Delpher.nl dan archieven.nl berupa Surat Kabar, *Java Bode*, Surat Kabar *De Vrije Zeeuw*, Surat Kabar *Het nieuwsblad voor Sumatra* dan Majalah *Indonesische documentatie dienst van*.

---

<sup>25</sup> Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Jogyakarta: Ombak, 2012), p.71.

<sup>26</sup> Kuntowidjoyo, *Metodologi Penelitian sejarah*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), p.94.

Sedangkan Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan sebagai pendukung dalam pendukung dalam penelitian. Mengulas dan membahas bukti-bukti dari sumber primer merupakan karya yang berjarak satu atau lebih langkah dari peristiwa atau informasi yang menjadi acuannya. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema. Penulis melakukan pencarian sumber-sumber referensi yang relevan penulis mengadakan kunjungan ke berbagai perpustakaan diantaranya adalah perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten dan buku-buku koleksi penulis. Dari kunjungan ke berbagai perpustakaan, ditemukan beberapa jilid buku yang menunjang diantaranya: Karya Soebagijo I.N. *Jusuf Wibisono Karang Di Tengah Gelombang*, karya Nugroho *Sejarah Nasional Indonesia VI.* , karya Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*, karya Deliar Noer. *Partai Islam Di Pentas Nasional*, karya Rusli, Karim. *Perjalanan Partai Politik Indonesia*, karya Slamet, Muljana. *Kesadaran Nasional*.

Karya Darsono *Perjuangan mendirikan bank sentral republik Indonesia*. Karya Ismail Maqdir, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Karya Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan*.

### 3. Verifikasi ( Kritik Sumber )

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber. Kritik sumber menyangkut verifikasi sumber yaitu menguji kebenaran atau ketepatan dari sumber yang penulis gunakan. Hal ini bertujuan agar penulis tidak menerima begitu saja informasi yang berasal dari sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.

#### a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Helius Sjamsuddin menjelaskan bahwa kritik ektern adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan untuk

mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang atau tidak.<sup>27</sup>

Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber.

#### b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan kelanjutan dari kritik ekstern yakni untuk meneliti kebenaran isi dokumen. Setelah fakta kesaksian ditegakan melalui kritik eksternal, berikutnya adalah mengadakan evaluasi terhadap kredibilitas isi dari kesaksian tersebut.<sup>28</sup> Kritik intern digunakan untuk menguji kredibilitas sumber yang terkumpul. Pengujian kebenaran isi data dilakukan dengan menghubungkan faktor-faktor yang berhubungan dalam pembuatannya.

#### 4. Interpretasi (Analisis Sumber)

Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan. Interpretasi ada dua macam, yaitu

---

<sup>27</sup> Sjamsudin, *Meodologi Sejarah*, p.105.

<sup>28</sup> Sjamsudin, *Meodologi Sejarah*, p.112.

analisis dan sintesis.<sup>29</sup> Analisis berarti menguraikan, maka dari sinilah akan ditemukan fakta sejarah. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, yaitu menyatukan hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh. Dalam proses interpretasi sangat memungkinkan adanya subyektifitas karena dalam tahapan interpretasi penulis bebas untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh.

#### 5. Historiografi (Penulisan)

Penulisan merupakan tahapan terakhir dalam Metodologi Penelitian Sejarah. Penulisan merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, kritik sumber dan penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologi merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan.<sup>30</sup> Pada bagian hasil

---

<sup>29</sup> Samsudin, *Metodologi Sejarah*, p.102.

<sup>30</sup> Kuntowidjono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1994) p. 107.

penelitian akan disajikan hasil penelitian mengenai Peran Yusuf Wibisono Pada Masa Pemerintahan Parlementer tahun 1950-1956 , yang dapat dipertanggung jawabkan dengan didukung sumber-sumber yang valid.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kajian Pustaka, Metode Penilitan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Riwayat Jusuf Wibisono, yang meliputi Kelahiran Jusuf Wibisono, Pendidikan Jusuf Wibisono, Karir Politik Jusuf Wibisono.

Bab III Kondisi Bangsa Indonesia Pada Tahun 1950-1956, yang meliputi Kondisi Politik, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Keagamaan.

Bab IV Keterlibatan Jusuf Wibisono Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia 1950-1956, yang meliputi Nasionalisasi De

Javasche Bank, Menanggapi Perjanjian-Perjanjian Luar Negeri,  
Meningkatkan Mutu Dan Kesejahteraan Para Pegawai Negera,  
Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Nasional.

Bab V Penutup, yang meliputi Kesimpulan, Saran, dan  
Lampiran-lampiran